

Dipungut Muktamar, Mahasiswa UMY Demo

JOGJA - Jelang Muktamar Muhammadiyah di Makassar, puluhan mahasiswa UMY melakukan aksi demonstrasi di kampus setempat kemarin (30/1). Aksi ini sebagai bentuk protes atas pungutan dana muktamar Muhammadiyah kepada mahasiswa UMY senilai Rp 75 ribu per mahasiswa.

Para pedemo menilai, pungutan yang dilakukan UMY bersamaan dengan pembayaran biaya semester genap tersebut, tidak sesuai dengan syariat Islam, dan bertentangan dengan semangat kemaslahatan yang dibangun KH Ahmad Dahlan.

"Apa dasar pungutan Rp 75 ribu yang dibebankan kepada mahasiswa UMY untuk muktamar Muhammadiyah. Apa dalilnya? Bukan kah infak, sedekah, atau sejenisnya dilandaskan pada keikhlasan, bukan pemaksaan, infak dan sedekah sesuai kemampuan umat," kata koordinator aksi, Prayoga dalam aksinya kemarin (30/1) ■

► Baca *Dipungut...* Hal 11

Coreng Ajaran Islam Yang Ajarkan Keikhlasan

■ DIPUNGUT...

Sambungan dari hal 1

Pungutan dana muktamar Muhammadiyah yang dibebankan kepada mahasiswa berdasarkan Keputusan PP Muhammadiyah yang ditindaklanjuti Keputusan Rektor Nomor: 024/SK-UMY/X/2014 tentang Kontribusi Mahasiswa UMY untuk muktamar ke-47 (2015) Muhammadiyah. Dalam surat itu dijelaskan, mahasiswa diwajibkan membayar dana muktamar senilai Rp 75 ribu. Jika tidak membayar, mahasiswa tidak dapat melakukan KRS untuk semester berikutnya.

"Sebagai kader dan warga Mu-

hammadiyah, kita harus ingat terhadap pesan KH Ahmad Dahlan (Jangan Kalian Mencari Hidup di Muhammadiyah, Hidup Hidupi lah Muhammadiyah). Sebesar apa dan sedasyat apa, sehingga muktamar Muhammadiyah harus membutuhkan dana besar dan harus memaksa kami yang kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah," kritik Prayoga.

Selain mengkritik pungutan muktamar, massa mempertanyakan rektorat yang masih bekerja sama dengan bank konvensional, bukan bank syariah dalam melakukan transaksi. Menurut mereka, sebagai perguruan tinggi yang menjunjung nilai Islam,

harusnya rektorat mengimplementasikan ajaran Islam dalam pengelolaan kampus.

"Jangan hanya bisa menyuruh orang lain menggunakan syariat Islam, sedangkan kampus sendiri menggunakan jasa keuangan model negara barat," paparnya.

Agar polemik ini tidak meluas, massa meminta kepada UMY segera mencabut surat keputusan tersebut, dan memberikan keleluasaan kepada mahasiswa terkait dengan dana muktamar. "Jangan mencoreng ajaran Islam dengan kebijakan-kebijakan memaksa. Islam mengajarkan keikhlasan dan welas asih," pintanya. (mar/jko/gp)